

KRISIS GLOBAL

Ginandjar: Segera Tanggalkan Sistem Neoliberal

Ginandjar Kartasasmita, Mantan Menko Ekuin yang kini Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Suara Karya : Rabu, 15 Oktober 2008

JAKARTA (Suara Karya): Pengakuan para pakar ekonomi di Amerika Serikat (AS) mengenai kegagalan ekonomi neoliberal harus menjadi peringatan untuk segera menanggalkan sistem tersebut. Dalam hal ini, saatnya Indonesia membangun sistem ekonomi nasional yang berbasis kemandirian.

"Sekarang kita di Indonesia harusnya meninjau kembali. Kita ini sangat ekstrem melaksanakan sistem liberal, bahkan lebih ugal-ugalan daripada AS sendiri sebagai kampiun ekonomi liberal. Kita harus melihat bahwa ada kegagalan dalam sistem neoliberal itu, jangan kita pertahankan," kata mantan Menko Ekuin yang kini Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita dalam diskusi mengenai krisis global dengan Suara Karya di Kantor DPD, Jakarta, Selasa (14/10).

Menurut Ginandjar, pendapat para pakar ekonomi yang menyatakan gagalnya paham neoliberal harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah, sehingga tidak lagi menerapkannya dalam sistem perekonomian nasional.

"Sekarang semua berpendapat krisis ini adalah kegagalan ekonomi neoliberal. Bukan pakar ekonomi kita saja, tapi juga para pakar ekonomi di AS. Ini harus jadi perhatian," ujarnya.

Bukti kegagalan penerapan sistem ekonomi neoliberal jelas terlihat dari dampak yang terjadi di beberapa negara yang terkena imbasnya, termasuk Indonesia.

"Yang kena negara-negara yang menganut sistem pasar terbuka. Sedangkan negara-negara seperti China, Vietnam, dan India, tidak kena. Negara yang memakai sistem setengah tertutup, apalagi tertutup, justru tidak kena. Sementara Eropa dan Malaysia di ASEAN tidak kena, karena begitu krisis mereka langsung kontrol dan menggunakan sistem tertutup," ujarnya.

Menurut Ginandjar, kegagalan ekonomi neoliberal membuka mata bahwa pasar terbuka yang didengungkan sebagai mekanisme pengendalian tidak bisa diterapkan begitu saja.

Kontrol pemerintah terhadap pasar, seperti di Eropa, perlu dipertimbangkan untuk tetap ada. Sehingga sistem di luar sistem neoliberal pantas diterapkan di Indonesia, karena sesuai dengan kondisi dan ideal menurut konstitusi.

"Orang akan melihat sistem yang lain, bisa jadi sistem social welfare (kesejahteraan sosial) seperti di Eropa. Itu sangat bisa jadi. Pasar tetap ada, tetapi negara berfungsi mengendalikan pasar itu dan meresdistribusikannya untuk mengendalikan pasar itu supaya aman," kata dia.

Ginandjar menjelaskan, dalam menghadapi krisis keuangan global akibat kegagalan sistem neoliberal itu, Indonesia harus mencari solusi alternatif. Misalnya, memanfaatkan pikiran-pikiran Tim Indonesia Bangkit yang dimotori Rizal Ramli.

Menurut Ginandjar, untuk mengatasi krisis keuangan global sekarang ini diperlukan pemerintahan yang sensitif serta bisa mengambil langkah yang tepat dan cepat dalam membaca situasi yang berkembang. "Karena itu, yang diperlukan bukan big government atau small government, tapi smart government. Hanya pemerintah yang tahu kapan mengintervensi, berapa besar takarannya serta kapan dan di mana. Itu yang kita butuhkan. Untuk itu, memang diperlukan leadership (kepemimpinan), baik politik maupun dalam bidang ekonomi," ujarnya.

Dalam hal ini, harus ada keterjaminan kehidupan bagi seluruh rakyat. "Makanya apapun yang terjadi dalam krisis, orang yang tidak mampu hidupnya tetap jalan dan orang yang tidak bekerja dapat uang. Itulah social welfare," ujarnya.

Menjelaskan kedua sistem ekonomi itu, mantan Ketua Bappenas yang juga pernah menjabat sebagai Menteri ini mengatakan, sewaktu belum terjadi krisis keuangan global seperti saat ini, kaum penganut paham neoliberal mengejek sistem ekonomi pasar yang dikendalikan tersebut.

"Itu (sistem ekonomi pasar) ditertawakan oleh kelompok neoliberal di Jepang dan AS. Dikatakannya pasar seperti itu biayanya sangat mahal. Sekarang, justru mereka yang ditertawakan karena ambruk. Di Swedia, Prancis, dan negara-negara lainnya di Skandinavia tidak ada yang ambruk dan tidak terjadi apa-apa. Di sana tidak ada yang tutup perusahaannya. Karena mereka bukan penganut neoliberal," ucap Ginandjar.

Meksi demikian, dia memastikan sistem neoliberal masih akan eksis menggerayangi sistem perekonomian di negara-negara berkembang yang kaya sumber daya seperti Indonesia. "Apakah kapitalis sudah mati, sistem pasar bebas mati, belum tentu. Tapi yang pasti model ekonomi terbuka seperti AS sekarang sudah turun kredibilitasnya," ujar Ginandjar.

Krisis yang terjadi di AS itu, tutur Ginandjar, hampir mendekati kejadian depresi ekonomi pada 1930 yang diakibatkan runtuhnya harga-harga saham perbankan negara itu. Krisis 1930 di AS baru pulih dan kembali kepada keadaan sebelum krisis setelah 25 tahun, yakni setelah melewati Perang Dunia II dan Perang Korea. Berdasarkan itu, krisis di AS sekarang dipastikan tidak bisa selesai dalam waktu dekat. "Saya tidak percaya krisis di AS itu cepat selesai. Paling tidak krisis di AS baru bisa pulih paling tidak 10 tahun ke depan," katanya.

Mengenang pengalamannya menangani krisis ekonomi di Indonesia pada 1998 sebagai perbandingan terhadap krisis 2008 yang dipicu krisis keuangan di AS, Ginandjar mengatakan, krisis global sekarang yang berimbas pada Indonesia kelihatannya jauh lebih mudah mengatasinya, meski tidak boleh dianggap enteng. Diakui Ginandjar, di Indonesia krisis sekarang berbeda dengan krisis 1998, karena bersumber di Asia atau dikenal sebagai krisis finansial Asia. Selain itu, kondisi saat itu juga diperparah dengan gejolak politik yang tidak stabil. (Rully/Indra)